

Pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh Di Kabupaten Deli Serdang

M. Fahmi Hidayat

¹Ilmu Administrasi Publik, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

fahmihidayat@gmail.com

Abstrak

Kawasan penduduk sebagai perwujudan bentukan permukiman manusia banyak mengalami permasalahan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk alami dan pendatang (urbanisasi). Arus pendatang yang terus bertambah akan mengakibatkan terjadinya proses semakin buruknya kualitas permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari empat narasumber diketahui bahwa Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan walaupun belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan. Tindakan yang dilakukan dalam pengendalian Permukiman Kumuh berupa melakukan survey, perencanaan dan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan instansi pemerintah dalam pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan berkoordinasi dalam mengusulkan daerah atau lokasi kumuh untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas permukiman. Walaupun, dalam pelaksanaannya seperti usulan diajukan belum tentu direalisasikan dan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan kerjasama tersebut. Tahapan pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan membuat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Tahapan tersebut dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pengendalian Permukiman Kumuh memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman yang berdampak berbagai aspek terutama kesehatan lingkungan. Walaupun ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kurangnya anggaran pemerintah.

Kata Kunci: *Implementasi, Pengendalian, Permukiman Kumuh.*

1. PENDAHULUAN

Permukiman dalam arti sempit adalah tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal. Sedangkan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat tinggal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Kawasan penduduk sebagai perwujudan bentuk permukiman manusia banyak mengalami permasalahan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk alami dan pendatang (urbanisasi). Arus pendatang yang terus bertambah akan mengakibatkan terjadinya proses semakin buruknya kualitas permukiman. Persaingan untuk mendapatkan lahan permukiman akan mendorong naiknya harga tanah di kawasan tersebut. Adanya persaingan penduduk dengan tingkat dan ekonomi yang berbeda dapat mengakibatkan terjadinya segregasi (pemisahan) antara permukiman yang satu dengan permukiman yang lain. Daerah-daerah dengan harga tanah yang tinggi akan didiami oleh penduduk yang mampu, sedangkan daerah-daerah dengan harga tanah yang murah akan didiami oleh warga kota yang berpenghasilan rendah atau sedang.

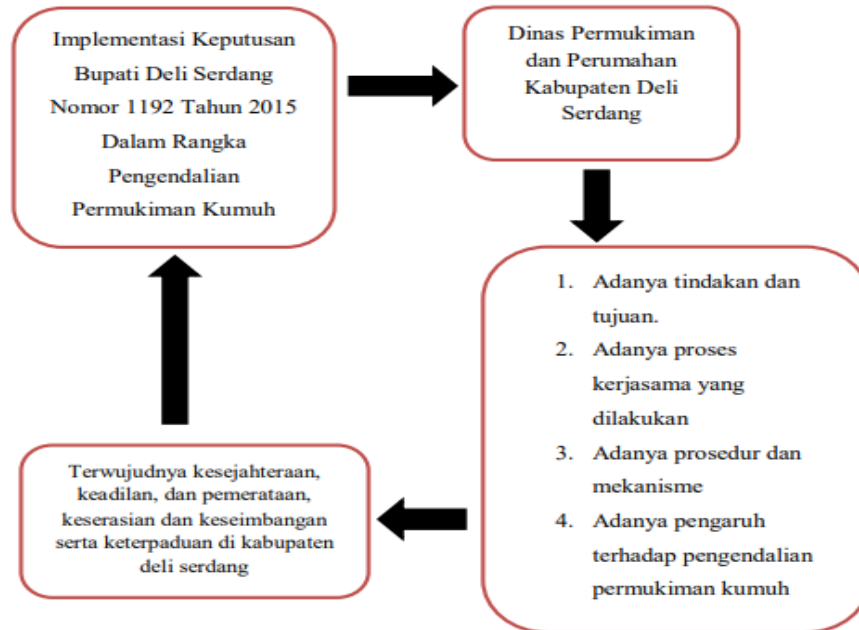
Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang uraian keenam berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pada umumnya permukiman kumuh juga diakibatkan ketidakteraturan struktur ruang. Adakalanya suatu permukiman tidak sesuai atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seringkali suatu permukiman bergeser fungsinya selain untuk bermukim juga dijadikan sebagai tempat usaha sehingga penggunaan bangunannya dapat berfungsi sebagai tempat hunian, tempat usaha atau tempat campuran. Kondisi ini dapat kita lihat dari perubahan permukiman sederhana yang berlokasi dekat pasar, menjadi tempat usaha, sehingga seringkali lokasi pasar sudah berpindah masuk ke lokasi perumahan membentuk pasar kilat. Situasi semakin merangsang penghuni perumahan sederhana untuk merubah pemanfaatan rumah tinggal menjadi rumah tempat usaha, yang akhirnya model rumah menjadi berubah. Pada umumnya terdapat kebiasaan untuk mengajak saudara-saudara mereka dari kampung untuk bekerja dan tinggal di kompleks permukiman ini. Sehingga terciptalah permukiman dengan kepadatan penduduk tinggi dan situasi ini memberi kesan kumuh pada suatu permukiman.

Kabupaten Deli Serdang merupakan Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu mencapai 2,16 juta jiwa. Dengan luas wilayah 4.397,94 km². Dari jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 hingga saat ini terdapat 461,00 hektar kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menunjukkan belum adanya pengendalian kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah secara tepat. Salah satunya di Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki tingkatan kumuh sangat buruk dengan Luas Kawasan mencapai 1.063 Hektar dan memiliki jumlah penduduk 13.568 jiwa serta luas kawasan kumuh mencapai 4,00 Hektar.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan lapangan. Berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur atau variabel lain yang mengontrol.



Gambar 1. Kerangka Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. tahapan analisis data kualitatif adalah: a) membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data; b) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data; c) menuliskan model yang ditemukan; d) coding yang telah dilakukan

3. HASIL

Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Zeifredin Purba, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan pemukiman kumuh di Deli Serdang dengan melakukan survey, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan jalan lingkungan, dan berkoordinasi

dengan pihak terkait. Dalam pengendalian permukiman kumuh di Deli Serdang memiliki hambatan yaitu keterbatasan dana / anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan terhadap bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk mengatasi pengendalian permukiman kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang membuat master plan perencanaan yang utuh menyeluruh satu kawasan, berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Suhariandi selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan Pengendalian Permukiman Kumuh

Adanya Kerja Sama Untuk Menjalankan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Zeifredin Purba, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Pengendalian Permukiman Kumuh berkerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Kerja sama yang dilakukan berupa pengusulan daerah atau lokasi kumuh untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitasnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan kerja sama ini masih memiliki kekurangan untuk melakukan pengendalian karena usulan yang diajukan belum tentu direalisasikan segera dan pelaksanaan pekerjaan tidak melibatkan secara langsung pihak kami.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.35 WIB dengan Bapak Samsul Bahri, ST selaku Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan bahwa untuk melaksanakan pengendalian Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan perangkat desa, dan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penataan Kawasan Kumuh. Kerjasama ini dilakukan dengan cara koordinasi antar instansi agar mencapai hasil yang maksimal.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Suhariandi selaku masyarakat, mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui adanya kerja sama yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan instansi atau lembaga lain dalam melakukan Pengendalian Permukiman.

Adanya Tahapan-tahapan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Zeifredin Purba, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pengendalian permukiman kumuh yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan pengendalian dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam tahapan pengendalian permukiman kumuh terdapat kendala karena masih ada masyarakat yang membangun permukiman di tanah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.35 WIB dengan Bapak Samsul Bahri, ST selaku Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan bahwa untuk melaksanakan pengendalian Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang tahapan yang dilakukan yaitu perencanaan, diprogramkan, penganggaran, dan pelaksanaan dilapangan. Tahapan pengendalian tersebut dilakukan dengan cara pengawasan pengendalian berdasarkan kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Suhariandi selaku masyarakat setempat, mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui adanya tahapan-tahapan kebijakan dalam Pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang.

Adanya Pengaruh Terhadap Permukiman

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Zeifredin Purba, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa hal-hal yang mempengaruhi kurangnya pengendalian permukiman kumuh berdasarkan pada kesadaran masyarakat yang masih kurang serta terbatasnya dana atau anggaran. Pengaruh yang dirasakan masyarakat setelah dilakukan permukiman kumuh yaitu adanya pengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Sedangkan dampak yang dihasilkan setelah dilakukan pengendalian permukiman kumuh, adanya peningkatan kualitas permukiman yang berdampak keberbagai aspek terutama kesehatan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.35 WIB dengan Bapak Samsul Bahri, ST selaku Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan bahwa untuk melaksanakan pengendalian Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang. Akan tetapi setelah dilakukan pengendalian Permukiman Kumuh masyarakat merasa terbantu dengan adanya program Pemerintah walaupun belum sebelumnya bisa diatasi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Suhariandi selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa adanya perubahan lingkungan di dusun saintis walaupun belum secara signifikan dirasakan oleh masyarakat

4. PEMBAHASAN

Analisis Hasil Wawancara

Adanya Tindakan-tindakan yang dilakukan

Dalam penelitian ini pelaksanaan pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang dijalankan sesuai dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 yang sudah ditetapkan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melakukan pengendalian Permukiman Kumuh dengan melakukan survey, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan jalan lingkungan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang juga melakukan perbaikan jalan lingkungan,

perbaikan drainase, renovasi rumah yang tidak layak huni, dan mengaliri sarana air bersih ke setiap permukiman. Akan tetapi dari keempat narasumber mengatakan bahwa hambatan-hambatan dalam pengendalian Permukiman Kumuh yaitu kurangnya anggaran serta kesadaran masyarakat dan tenaga teknis. Akan tetapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang telah mengatasi hambatan tersebut dengan cara menambah anggaran, menambah tenaga tim teknis serta berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas perumahan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengendalian Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sudah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 tahun 2015.

Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan

Kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan instansi Pemerintah lainnya berbentuk koordinasi. Koordinasi ini dilakukan dengan mengusulkan daerah atau lokasi kumuh untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Akan tetapi dari beberapa narasumber mengatakan bahwa terdapat hambatan dalam kerja sama yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Deli Serdang dengan instansi Pemerintah lainnya seperti pelaksanaan pekerjaan tidak melibatkan secara langsung pihak dinas terkait, usulan yang diajukan belum tentu direalisasikan serta adanya lembaga atau instansi yang kurang merespon terhadap permasalahan Permukiman Kumuh.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengendalian Permukiman Kumuh, kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan beberapa instansi atau lembaga Pemerintah dapat dijalankan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan realisasi kerjasama yang telah disepakati.

Adanya tahapan-tahapan kebijakan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melakukan tahapan pengendalian Permukiman Kumuh dengan membuat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Tahapan pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi terhadap pihak terkait. Dalam melakukan tahapan-tahapan pengendalian Permukiman Kumuh menurut seorang narasumber mengatakan bahwa masih adanya masyarakat yang membangun perumahan di permukiman di tanah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pengendalian Permukiman Kumuh yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Sudah dilakukan dengan baik, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang membangun perumahan di permukiman di tanah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan.

Adanya pengaruh terhadap pengendalian permukiman

Pengendalian permukiman kumuh memberikan pengaruh pada masyarakat dalam hal kenyamanan dan kesehatan lingkungan dan adanya peningkatan kualitas permukiman. Walaupun masih ada beberapa hal yang mempengaruhi kurang

maksimalnya pengendalian Permukiman Kumuh seperti kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya kebersihan, kurangnya penyediaan tanah, kurangnya pembiayaan dan pembinaan terhadap masyarakat, dan kurangnya peran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengendalian Permukiman Kumuh.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian Permukiman Kumuh memberikan pengaruh terhadap masyarakat walaupun belum sepenuhnya masyarakat merasakan dampak tersebut.

Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi pelaksanaan pengendalian Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sudah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 tahun 2015. Kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan beberapa instansi atau lembaga Pemerintah dapat dijalankan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan realisasi kerjasama yang telah disepakati, tahapan pengendalian Permukiman Kumuh yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sudah dilakukan dengan baik, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang membangun perumahan di permukiman di tanah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan, pengendalian Permukiman Kumuh memberikan pengaruh terhadap masyarakat walaupun belum sepenuhnya masyarakat merasakan dampak tersebut.

5. KESIMPULAN

Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan jalan lingkungan, melakukan penataan lingkungan, penyediaan rumah layak huni, perbaikan drainase, dan perbaikan jalan lingkungan. Berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan pengendalian Permukiman Kumuh sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan walaupun belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan.

Tindakan yang dilakukan dalam pengendalian Permukiman Kumuh berupa melakukan survey, perencanaan dan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan instansi pemerintah dalam pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan berkoordinasi dalam mengusulkan daerah atau lokasi kumuh untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas permukiman serta untuk pembangunan rumah tidak layak huni, jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum. Akan tetapi, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti usulan diajukan belum tentu direalisasikan dan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan kerjasama tersebut.

Tahapan pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan membuat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Tahapan tersebut dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pengendalian Permukiman Kumuh memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman yang berdampak berbagai aspek terutama

kesehatan lingkungan. Walaupun ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian Pemukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kurangnya anggaran pemerintah.

REFERENSI

- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Adhani, A., Anshori, A., & Mahardika, A. (2022). Public Attitudes towards the Government's Policy Communication in Preventing COVID-19. *Jurnal ASPIKOM*, 7(1), 61-70.
- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Anshori, A., Sos, S., Kom, M. I., Mahardika, A., Sos, S., MAP, A. S. S. S., ... & Tanjung, Y. (2021). Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan (Vol. 1). umsu press.
- Agus, E., & Ali, K. (2022). Environmental Education for High School and Vocational School of Muhammadiyah City of Medan Based On Islam. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 930-937.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- ALI, K. (2018). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PERCONTOHAN YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2).
- Hajar, S., & Tanjung, I. S. (2020). Aplicación de un enfoque participativo en el empoderamiento de las aldeas costeras. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2017, October). Empowerment of Coastal Community Through Village Potential. In *International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017)* (pp. 297-299). Atlantis Press.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik (Vol. 1). umsu press.
- Hajar¹, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Hartanto, D., & Siregar, S. M. (2021). Determinants of overall public trust in local government: Meditation of government response to COVID-19 in Indonesian context. *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Hartanto, D., Hidayat, N., & Sazali, H. (2019, January). The Leadership of Head of the Medan City Police Department in Strengthening Community Systems. In *1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (pp. 205-209). Atlantis Press.
- Izharyah, J. R., & Lubis, F. H. (2020). Analysis of Masterplan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 2821-2834.
- Izharyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 4(2), 109-117.
- Izharyah, J. R. (2022, February). Community Social Phenomenon as A Preventive Action and Disaster Mitigation of Longsor Disasters in Simalungun District. In *PROCEEDING*

- INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE (Vol. 1, p. 397). umsu press.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32-43.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Kusnita, N., Wibowo, Y. S., Tanjung, I. S., & Nugroho, R. (2021). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Mendukung Potensi Bisnis Transportasi Laut Kepulauan Riau. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(6), 724-734.
- Martinelli, I. (2017). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 308-328.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143)*.
- MAHARDIKA, A. (2017). TEKNIK PEMBERIAN PAKAN (CAKE) PADA LARVA IKAN KOI (*Cyprinus carpio*) DI INSTALASI BUDIDAYA AIR TAWAR PUNTEN, KOTA BATU, JAWA TIMUR.
- Mujahiddin, M., & Mahardika, A. (2018). Analisis Potensi Konflik antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Warta Dharmawangsa*, (55).
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318)*.
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 3(2), 87-96.
- Roziqin, A., Adejaya, M. S., & Ali, K. (2019, October). Strengthening local economy through tourism village: Case study in Dukuh Dalem, Sleman Regency. In *Iapa Proceedings Conference (pp. 173-179)*.
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.
- Syahputra, B. P., & Tanjung, I. S. (2019). Membangun Sinergi Pusat Karir dan Program Studi Melalui Program Tracer Study dan Pengembangan Karir Lulusan. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit*

- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, H., Handoko, Y., Tanjung, I. S., & Yuniarsa, S. O. (2022, March). CREATIVITY AND INNOVATION IN SMALL BUSINESS: A DIGITAL SYSTEM LITERATURE REVIEW WITH ROUND MAP NEW NORMAL. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 795-802).
- Tanjung, E. F., Harfiani, R., & Sampedro Hartanto, H. (2021). Formation of Soul Leadership Model in Indonesian Middle Schools. *Educational Sciences: Theory And Practice*, 21(1), 84-97.
- Tanjung, I. S., & Putri, S. P. (2022). Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 119-123.
- Tanjung, I. S., Tanjung, H., & Wibowo, Y. S. (2021). Development of Tourism Communication Model Based on Local Wisdom in Padangsidempuan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 9877-9885.
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). ENHANCING LITERATURE ON PROCEDURAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL LEARNING: EXAMINING MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL LEARNING AND ORGANIZATIONAL TRUST. *Journal of Security & Sustainability Issues*, 10(2).
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.